

## ABSTRAK

Penyidik Polri merupakan penegak hukum yang mendapat tugas dan tanggung jawab menyelesaikan tindak pidana pemilu di tingkat penyidikan. Secara umum tugas Polri dalam penyelenggaraan pemilu yaitu melakukan pengamanan setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Melakukan penyidikan tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota.

Penelitian ini tentang : Peranan Penyidik Polres Pematang Jaya dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Pematang Jaya Tahun 2015”, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan penyidik Polres Pematang Jaya dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah. hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah dan cara mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Peranan Penyidik Polres Pematang Jaya dalam penanganan tindak pidana Pemilihan kepala daerah di Pematang Jaya tahun 2015 yaitu sebagai penyidik adanya dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah. Penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah dilaksanakan berdasarkan laporan panitia pengawas setelah melalui pembahasan dalam sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) terhadap laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Terdapat masalah dalam penanganan tindak pidana pemilu antara lain masalah *Money politic* sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, masalah mencoblos lebih dari satu kali, dan membuat suara pemilih menjadi tidak bernilai atau membuat perolehan suara paslon tertentu menjadi berkurang yang masih menggunakan ketentuan KUHP dalam hal ancaman pidananya. Hambatan yang dihadapi penyidik Polres Pematang Jaya dalam penanganan tindak pidana pemilu tahun 2015 yaitu singkatnya waktu penanganan tindak pidana pemilu dan hambatan teknis penyelesaian administrasi. Cara mengatasi hambatan tersebut yaitu koordinasi dengan pihak terkait dalam Sentra Gakkumdu dan Penyederhanaan birokrasi administrasi

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) hendaknya dilakukan secara lengkap terhadap perbuatan tertentu, apalagi terhadap tindak pidana khusus yang lemah apabila diterapkan KUHP yang merupakan ketentuan pidana umum, demikian pula terhadap tindak pidana pemilu disamping mengatur perbuatan yang dapat dipidana hendaknya dicantumkan pula ancaman pidananya. Hal ini penting agar kebijakan kriminal dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Perlu adanya upaya non penal yang lebih intensif dalam penanggulangan tindak pidana pemilu seperti *money politic* yang masih saja ada karena lemahnya sanksi pidana. Upaya non penal dapat dilakukan melalui pendekatan agama sehingga tujuan utama dari pendekatan non-penal yaitu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemilu, Penyidik

## ABSTRACT

Police investigators are law enforcers who have the task and responsibility of completing criminal election at the level of investigation. In general police duties in the administration of elections, namely security for each stage of the election. Conduct investigation of criminal offenses reported to the police election through the Election Supervisory Body, the provincial Election Supervisory Committee, Panwaslu district / city.

This research is about: "The Role of the Police Investigators Handling Pemalang Crime Election 2015", aims to identify and analyze the role of Pemalang district police investigator in the handling of criminal acts in the elections. barriers faced by investigators in handling criminal acts of the local elections and how to overcome them. The method used juridical empirical. Data collected through interviews, documents and literature studies. The data were analyzed qualitatively.

Police investigators Pemalang role in the handling of criminal acts in Pemalang Selection of regional heads in 2015, namely as an investigator of the alleged criminal acts of the local elections. Handling of criminal acts carried out by the local election supervisory committee report after a discussion of the integrated role in law enforcement centers (Centers Gakkumdu) to report violations of the elections. There is a problem in penangana criminal election among other issues Money politics as stipulated in Article 73 paragraph (1), paragraph (2) and (3) Law on local elections, issues voted more than once, and make the voters into worthless or make the vote a certain paslon be reduced still invoke the provisions of the criminal Code in terms of criminal threat. Police investigators obstacles faced in handling criminal offense Pemalang election in 2015 that the shortness of time handling criminal election and technical barriers to the completion of the administration. How to overcome these obstacles is the coordination with relevant parties in Gakkumdu Sentra and the simplification of administrative bureaucracy

Criminal policies (criminal policy) should be done in full against certain acts, especially against a weak special crimes if applied to the Criminal Code which is the general criminal provisions, as well as the election of the offenses in addition to regulate acts that may be liable to criminal threat should be listed as well. It is important that the criminal policy can achieve the desired objectives. There should be attempts non penal more intensive in combating criminal election as money politics that still exists due to the weak criminal sanctions. Non penal efforts can be made through the religious approach so that the main purpose of the non-penal approach is to improve social conditions certain, however indirectly have pengeruh prevention of crime

Keywords: Crime, Elections, Investigators